

PROSPEK GERAKAN RADIKALISME DI INDONESIA

Ruslan Ismail Mage

Dosen Tetap Universitas Ekasakti Padang

Email : ruslan.mage@gmail.com

ABSTRAK

Prospek gerakan radikalisme di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana prospek gerakan radikalisme di Indonesia? Hasil penulisan ini menemukan empat hal menarik. Pertama, gerakan radikalisme bukan sebagai produk agama, karena semua agama hanya mengajarkan kebaikan. Peran agama hanya mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat (dalam konteks agama Islam dikenal sebuah frase dalam bahasa Arab : *Amar ma'ruf nahi munkar*). Kedua, pemantik utama gerakan radikalisme adalah kerusakan sistem, dengan didukung teori kerusakan sistem dan teori kekerasan struktural. Ketiga, aksi damai gerakan 411 dan 212 membantah radikalisme produk agama. Keempat, prospek gerakan radikalisme di Indonesia lebih besar peluangnya disebabkan karena kerusakan sistem, dibanding disebabkan latar belakang agama.

Kata kunci : prospek, radikalisme, agama, sistem

ABSTRACT

*Prospects of radicalism movement in Indonesia. This writing uses literature research methods. The problem in this paper is how is the prospect of radical movement movement in Indonesia? The results of this writing found four interesting things. First, radicalism is not a product of religion, because all religions only teach goodness. The role of religion only invites or advocates good things and prevents things that are bad for society (in the context of Islam known a phrase in Arabic: *Amar ma'ruf nahi munkar*). Secondly, the main lighter of the radicalism movement is the destruction of the system, supported by the theory of system damage and the theory of structural violence. Third, the peaceful action of movements 411 and 212 denied the radicalism of religious products. Fourth, the prospect of the radicalism movement in Indonesia is more likely due to system damage, rather than due to religious background*

Keywords: *prospect, radicalism, religion, system*

1. Pendahuluan

Pada saat kita memasuki melenium ketiga, politik global ditandai oleh dua kejadian penting yang kemungkinan akan berlangsung lama. Pertama, penyebaran gagasan-gagasan demokrasi kepada masyarakat dan budaya yang berbeda yang dapat memberikan dampak politik yang berbeda dalam masyarakat tersebut. Kedua, munculnya kembali isu-isu etnis dan agama dalam kehidupan ppublik (Yunanto 2004:37). Hal ini kemudian dipertegas oleh Geroe Sorensen, bahwa demokratisasi

akan mewarnai kehidupan negara-negara sedang berkembang, tidak terkecuali Indonesia (Sorensen 2003:24).

Angim reformasi yang bertuip begitu kencengnya di Indonesia telah menerbangkan dinding-dinding otoritarianisme yang mengungkung demokrasi selama ini. Segera setelah itu lahirlah *Laissez-faire* ala Indonesia (kebebasan di hampir seluruh elemen kehidupan berbangsa), yang sudah lama dinantikan oleh kelompok-kelompok yang selama ini merasa ditekan dan dikebiri penguasa otoriter yang terpusat. Sejumlah aktor (perorangan), kelompok, institusi baik yang pro maupun yang kontra serta merta bermunculan saling berebut pengaruh. Persoalannya kemudian yang mewarnai proses transisi demokrasi adalah terdapatnya kelompok-kelompok dalam usahanya mencari pengaruh menggunakan cara-cara kekerasan, yang bagi sebagian orang diberinya label gerakan radikal.

Data menunjukkan di beberapa negara (tidak terkecuali Indonesia) hanya ada dua kelompok yang mewarnai proses pembangunan politik menuju demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kelompok moderat (memperjuangkan ide-idenya sesuai dengan konstitusi), dan kelompok garis keras yang selalu berusaha memaksakan kehendak dengan cara-cara kekerasan. Kelompok terakhir ini biasa juga disebut sebagai kelompok militan yang radikal. Kondisi ini dipicu oleh adanya ruang kebebasan, sehingga semua orang berhak mengekspresikan keyakinannya termasuk juga kalangan yang diidentifikasi sebagai kelompok radikal. Semua berada dalam ruang dan waktu yang saling berebut dalam ranah publik, dan kemudian sejarah akan mengujinya. Lalu bagaimana prosep gerakan radikalisme di Indonesia?

2. Pengertian Radikalisme

Untuk menjawab bagaimana prosep gerakan radikalisme di Indonesia, terlebih dahulu harus memahami apa dan siapakah yang dimaksud radikalisme itu. Sepanjang yang kita baca dari referensi-referensi yang ada, belum di temukan bahwa radikalisme tertuju pada suatu ajaran agama, apalagi ditujukan secara khusus kepada salah satu agama. Akan tetapi kebanyakan definisi mengkaitkannya dengan politik. Berikut ini kita nukilkan tentang pengertian radikalisme.

Radikalisme (dari bahasa Latin *radix* yang berarti “akar”) adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung Gerakan Radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Begitu “radikalisme” historis mulai terserap dalam perkembangan liberalisme politik, pada abad ke-19 makna istilah radikal di Britania Raya dan Eropa daratan berubah menjadi ideologi liberal yang progresif (<https://almanhaj.or.id/4120-radikalisme-sebab-dan-terapinya.html>).

Melalui penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa asal muasal tindakan radikal muncul dari salah satu aliran politik bukan dari ajaran agama tertentu. Dengan kata lain dapat pula kita nyatakan bahwa gerakan radikal tidak bersumber dari ajaran agama. Namun bisa saja terjadi kesalah pahaman dalam agama menimbulkan gerakan radikal.

Istilah radikalisme ini seperti tertuang dalam kamus bahasa Indonesia, merupakan kata serapan yang terdiri dari dua kata *radical* dan *isme*, yang setelah

digabungkan bermakna paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dalam buku *“Ensiklopedia Indonesia”* diterangkan bahwa “radikalisme” adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut. Kedua definisi tersebut pada intinya menghendaki perubahan dengan cara ekstrem, kekerasan dan drastis.

Jika dilihat dari segi bahasa, istilah radikal tidak selalu bermakna negatif seperti definisi di atas, namun istilah radikal juga disebutkan ahli bahasa yang lain sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Dalam definisi terakhir ini “radikalisme” dianggap cenderung bermakna perubahan positif.

Kebiasaan dalam stigma radikalisme, suatu kelompok akan menuduh kelompok lain sebagai kelompok radikal, belum ada standar yang jelas dalam penilaian kapan suatu kelompok atau pribadi tertentu disebut sebagai orang atau kelompok yang berpaham radikal. Selama ini wewenang penilaian selalu diserahkan pada persepsi media masa atau pengaruh kekuatan politik. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan membaca sejarah radikalisme dari masa ke masa.

3. Radikalisme Bukan Produk Agama

Dengan beberapa pengertian seperti di atas, dapat dimengerti bahwa arti radikalisme tidak ada sangkut pautnya dengan muatan ajaran yang terkandung dalam agama, karena agama bukan merupakan konsep kehidupan yang lahir dari hasil budaya manusia, melainkan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui para rasul utusannya untuk menjadi pedoman kehidupan manusia supaya dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Itulah kemudian makalah ini tidak tertarik menghubungkan gerakan radikalisme dengan agama.

Jadi arti radikalisme baik secara etimologi maupun termonologis jelas bukan merupakan produk budaya dari agama apa pun. Karena sifatnya selalu berorientasi/berkonotasi negatif emosional dan tidak rasional dan selalu mendewakan/mempertuhankan nafsu, memaksakan kehendak sendiri, dan tidak menghormati pendapat orang lain, tanpa memperdulikan benar-salahnya pendapat atau keinginan yang akan dilakukan.

Semua agama yang diturunkan ke bumi esensi ajarannya sama, yaitu bagaimana manusia diwajibkan berbuat baik. Jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang, tumbuhan, dan alam pun diajarkan berbuat baik. Lalu bagaimana mungkin, sikap radikalisme itu selalu diidentifikasi sebagai ajaran salah satu agama, khususnya agama Islam.

Lebih memprihatinkan lagi, ketika institusi-institusi pendidikan seperti pesantren dianggap sebagai pabrik yang memproduksi orang-orang berpikir radikal yang berpotensi menjadi terorisme. Sempat beredar isu bahwa pesantren adalah tempat berkecambahnya radikalisme. Isu ini bahkan sempat disikapi oleh pemerintah dengan rencana lucu (yang gagal) untuk memeriksa sidik jari para santri pesantren di Indonesia. Belum lagi ditambah dengan kecurigaan dunia Barat yang dimotori oleh Amerika Serikat pasca Tragedi 11 September yang secara gencarnya

menuduh radikalisme/terorisme, dengan slogan ‘*are you with us or with them-terrorist-*’, yang menuding lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam, seperti madrasah dan belakangan juga pesantren dianggap sebagai *the breeding ground*, tempat perkecambahan radikalisme.

Dari sudut pandang sejarah, tuduhan yang dialamatkan kepada pesantren di Indonesia sebagai sarang radikalisme merupakan tuduhan tanpa argumentasi yang kuat. Jika tuduhan tersebut terus dipertahankan, bisa jadi akan semakin merusak kepercayaan kalangan pesantren kepada pemerintah. Dampak negatifnya adalah meracuni persepsi generasi kini dan mendatang terhadap pesantren yang menyeramkan, kuno, kumuh, lusuh, dan ketinggalan zaman. Padahal fakta sejarah justru membuktikan bahwa pesantren banyak melahirkan tokoh bangsa.

3.1. Peran Agama

Peran agama dalam konteks lahirnya gerakan radikalisme hanya membenarkan suatu sikap untuk memperbaiki sesuatu yang dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Membenarkan gerakan penegakan keadilan, membenarkan perlakuan yang sama secara hukum kepada seluruh umat manusia. Dalam konteks agama Islam dikenal sebuah frase dalam bahasa Arab “*Amar ma'ruf nahi munkar*” (maksudnya mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat). Peran agama hanya memberika kekuatan moral terhadap kelahiran perasaan “Kolektivitas Sosial” yang sama. Sejenis perasaan yang memiliki nasib dan tanggungjawab, serta nilai-nilai moral yang sama dalam memperjuangkan keadilan yang merata keseluruhan umat manusia. Agama hanya memayungi perjuangan umat yang menuntut negaranya dikelola dengan penegakan hukum tanpa diskriminasi. Namun agama tetap mengajarkan agar dalam memperbaiki yang salah, meluruskan yang bengkok, lakukanlah dengan damai dan jangan gunakan kekerasan. Saya analogikan agama hanya sebagai wadah bagi api radikalisme yang sudah menyala akibat ketidakadilan hukum dan ekonomi yang dipertontonkan penguasa negara.

Kalaupun kemudian terjadi kekerasan di situ, bukan lagi faktor agama yang menjadi pertimbangan, tetapi sudah masuk ke wilayah psikologi massa atau kerumunan. Ketika terjadi penumpukan massa, dengan sendirinya akan tercipta kerumunan. Sementara sifat-sifat kerumunan diantaranya : lebih mudah dihasut dan digerakkan, objek yang menjadi perhatian kerumunan adalah kejadian yang sedang terjadi saat itu, kerumunan seringkali menggunakan cara-cara yang emosional dan diluar rasional. Sulit dilakukan kontrol terhadap kerumunan karena kadar kesadaran mereka tinggi namun hanya bersifat sementara karena biasanya kerumunan tidak berstruktur, jadi sulit untuk mendapatkan bentuk kerumunan yang sama seperti bentuk sebelumnya. Menurut Soerjono Soekanto, kerumunan biasanya bertindak secara emosional, untuk mencapai tujuan tertentu cenderung menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau karena tidak adanya keadilan (Soekanto 2001:161).

4. Gerakan 411 dan 212 Membantah Radikalisme Produk Agama

Seiring dengan perjalanan umur dunia yang semakin tua, jumlah agama dan aliran kepercayaan semakin terpecah berkeping menjadi sangat banyak. Jika agama telah terpecah menjadi banyak sekte, maka aliran-aliran kepercayaan di dunia saat ini dapat diperkirakan berjumlah ribuan atau puluhan ribu. Di Indonesia saja kini memiliki enam agama resmi (*Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu*) dan 245 aliran kepercayaan yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 (Wikipedia). Diperkirakan Indonesia dengan banyak suku dan 700 bahasa maka aliran kepercayaan yang tidak terdaftar masih banyak lagi.

Dengan melihat banyaknya perbedaan keyakinan di atas, Indonesia bisa disebut sebagai lahan paling subur tumbuhnya bibit radikalisme. Dengan realitas perbedaan diametral antar agama dan aliran kepercayaan maka sangat potensial untuk terjadi sentiment, konflik hingga peperangan. Sebagaimana dalam pandangan psikologi sosial, bahwa potensi konflik terjadi dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan.

Namun faktanya Indonesia tetap utuh berdiri di atas kemajemukan itu. Alasannya, karena masyarakat nusantara, sudah terbiasa dengan munculnya keberagaman agama, keaneragaman suku bangsa, budaya, dan bahasa. Bagi bangsa Indonesia perbedaan agama, suku, dan bahasa sudah final dan tidak perlu diperdebatkan dan dipertentangkan lagi. Kalau Indonesia mau pecah akibat gerakan radikalisme yang bernuansa agama, sejak dari dulu pecah berantakan. Artinya gerakan radikalisme berlatar belakang agama untuk melawan pemerintahan yang sah secara konstitusional di Indonesia sudah berakhir pasca pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dibawa pimpinan Kartosuwiryo yang tahun 1962. Sesudahnya hampir tidak ada lagi gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Hal ini disebabkan, karena umat Islam sebagai agama mayoritas sudah mulai menerima keragaman itu.

Bahkan menurut pemimpin tertinggi Al-Azhar Prof. Dr. Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb, agama Islam di Indonesia telah menjadi agama kemanusiaan secara universal. Bangsa Indonesia telah mampu menyingkap khazanah keislaman yang suci serta nilai-nilai hukum Islam dan akhlakunya dengan mewujudkan nilai keadilan, persamaan, dan sikap terbuka kepada orang lain (Matatasbih.net, *Indonesia Telah Dipilih Allah Menjaga Kaeslian Islam*).

Kondisi ini kemudian mendapatkan justifikasi dari gerakan aksi damai jutaan umat Islam tanggal 4 November yang kemudian berlanjut pada tanggal 2 Desember 2016, yang terkenal dengan gerakan 411 dan 212. Gerakan yang melibatkan ratusan ribu bahkan sampai jutaan umat Islam ini hanya menuntut keadilan ditegakkan bagi penista agama gubernu DKI non atif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak lebih dan tidak kurang. Gerakan 411 dan 212 ini sama sekali tidak mengangkat isu SARA (suku, agama, ras). Gerakan aksi damai ini tidak pernah mempersoalkan agama dan suku seorang pemimpin, karena persoalan agama dan suku di Indonesia sudah selesai titik, bukan koma lagi.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang melibatkan ratusan ribu bahkan sampai jutaan orang umat Islam ini bukan untuk melawan pemerintahan yang sah secara konstitusional. Gerakan ini hanya menuntut keadilan ditegakkan di republik ini, yang salah dihukum tanpa ada

perbedaan antara rakyat dan pemimpin. Gerakan ini menuntut semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Kalau tuntutan ini dipenuhi oleh pembuat kebijakan, maka gerakan ini akan berakhir dengan damai, tetapi kalau pemerintah membiarkan hukum dipermainkan oleh pemilik modal berkolaborasi dengan partai politik, maka gerakan damai ini berpotensi menjadi gerakan radikal. Kalau pemerintah hanya diam membiarkan kerusakan sistem hukum yang selama ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka pemerintah yang memaksa rakyatnya menjadi radikal. Artinya, bukan agama pemicu utama lahirnya radikalisme! Tetapi kerusakan sistem yang menjadi pemantik utama gerakan radikalisme. Lebih jelasnya berikut penjelasan teori kerusakan sistem sebagai pemantik utama lahirnya radikalisme.

5. Kerusakan Sistem Pemicu Utama Lahirnya Radikalisme

Seperti dijelaskan di atas, bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan atau berpikir dan bertindak radikal. Begitu pula tidak ada institusi pendidikan, baik sekolah umum yang dibentuk negara, maupun sekolah yang diinisiasi oleh swasta seperti pesantren mengajarkan kekerasan atau paham radikalisme. Justru yang diajarkan sebaliknya, yaitu bagaimana setiap orang harus jujur, bersikap adil, berbuat benar, tidak boleh mengambil yang bukan haknya, tidak boleh melanggar empat norma, agama, hukum, kesopanan, dan norma kesusilaan.

Persoalannya kemudian, ketika generasi produktif bangsa ini, yang sudah dikonstruksi pemikirannya harus selalu berbuat baik, jujur dan adil kepada orang lain, masyarakat, lingkungan, bangsa dan negaranya, kemudian tidak jarang menghadapi antitesa ajaran yang didapatkan disekolah dengan realitas sosial yang dihadapi di lingkungannya. Mereka membayangkan keluar dari pendidikan, akan berhadapan dengan lingkungan sosial yang sama dengan gambaran ketika masih dalam proses pembelajaran.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka tidak menemukan keadilan, dan kejujuran dalam lingkungan sosialnya, sebagaimana konstruksi pemikiran yang dibangun dari awal. Mereka melihat kerusakan sistem hukum yang tidak adil dimana-mana. Menghukum seorang nenek gara-gara mencuri lima biji buah kakao di kebun tetangganya, sementara membebaskan orang yang sudah merampok uang negara. Mereka melihat kerusakan sistem pendistribusian kekayaan negerinya yang hanya memberikan kebebasan kepada pemilik modal mengeksploitasi sumber daya alam, sementara menangkap dan memenjarakan rakyat miskin yang mencari sesuap nasi di buminya sendiri. Mereka menyaksikan kerusakan sistem kepemimpinan yang hanya melahirkan perilaku pemimpin yang menggadaikan dan bahkan menjaul daerah dan bangsanya kepada kapitalisme global.

Kerusakan sistem hukum yang tidak mampu mendistribusikan keadilan yang merata kepada seluruh warga bangsa, kerusakan sistem ekonomi yang tidak mampu mengalokasikan kekayaan alam yang merata kepada warga bangsa, kerusakan sistem rekrutmen kepemimpinan yang hanya memberikan kesempatan kepada pemilik modal menjadi pemimpin yang korup, adalah pemicu utama lahirnya pemikiran dan perilaku radikalisme.

Kaitan dengan kerusakan sistem sebagai pemantik utama munculnya gerakan radikalisme, teori kekerasan Johan Galtung, seorang kriminolog dari

Norwegia dan seorang polemolog. Teorinya yang bertalian dengan kekerasan yang paling menarik dikedepankan dalam membahas isu-isu radikalisme. Dalam pengulasan dan penganalisaan lebih lanjut, sampailah pada kesimpulan bahwa teori kekerasan struktural pada hakekatnya adalah teori kekerasan "sobural". Dengan "sobural" di maksudkan suatu akronim dari (nilai-nilai) sosial, (aspek) budaya, dan (faktor) struktural (masyarakat). Sementara itu menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut (Santoso 2002).

1. Teori Kekerasan sebagai Tindakan aktor (individu) atau Kelompok

Para ahli teori kekerasan kolektif ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Wujud kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

2. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.

3. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Menurut pendapat para ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat.

Tulisan ini, mencoba memakai "teori kekerasan struktural" dalam memahami munculnya gerakan radikalisme di Indonesia, bahwa radikalisme itu tidak muncul akibat bawaan dari seseorang karena faktor genetika. Radikalisme itu muncul karena dipicu oleh negara dalam hal ini pemerintah yang membiarkan sistem itu rusak. Sebagaimana salah satu teori kerusakan sistem David Apter yang kemudian saya kontruksi menjadi teori radikalisme yang mengatakan "Jika suatu sistem rusak tidak diperbaiki atau terlambat diperbaiki, maka sistem itu yang memaksa rakyatnya menjadi radikal".

Pemerintah yang membiarkan sistem rusak itu artinya negara secara tidak langsung memberi kontribusi munculnya kekerasan akibat pemberontakan sistem oleh rakyat. Terjadinya berbagai tindak kekerasan, tidak bisa melepaskan diri dari peran negara terhadap terjadinya kekerasan negara (kekerasan terorganisir). Karenanya kekerasan negara merupakan jenis kekerasan yang perlu mendapat perhatian serius dari kalangan sipil. Sebab kekerasan negara memiliki kekuatan destruktif sangat besar dibandingkan dengan kekerasan tidak terorganisir. Kekerasan ini sulit ditembus oleh kekuatan moral dan sosial karena hambatan justifikasi politik hukum yang melekat di dalamnya (Triyono 2002:75). Negara sebagai institusi politik temuan dan hasil peradaban manusia pada dasarnya merupakan kekerasan terorganisir (Triyono 2002:77).

Negara tidak lain merupakan organisasi politik yang ditemukan, dibentuk, dibesarkan, dengan cara-cara kekerasan. Karena cara-cara ini merupakan cara-cara

yang dianggap efektif untuk berdirinya sebuah negara. Realitas ini sengaja dibentuk, biasa dipakai dan hampir tidak pernah dipermasalahkan lagi, dimana negara dengan segala sarana kekerasan yang ada padanya bisa digunakan para aktor politik yang haus kekuasaan untuk meraih dan mempraktekan kekuasaannya. Meskipun masyarakat pada akhirnya cenderung untuk melakukan perlawanan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang. “Secara kultural, represi dan tekanan yang dilakukan aparat negara untuk tujuan penciptaan stabilitas telah menimbulkan keberanian masyarakat untuk bersifat kritis (Fattah 2000:260).

6. Demokrasi, Agama dan Radikalisme

1. Sisi Gelap Demokrasi

Dalam *The Dark Side of Democracy, Explaining Ethnic Cleansing*, Michael Mann memaparkan bahwa praktek demokrasi di berbagai belahan dunia, terutama setelah perang dunia I dan II, tidak hanya bermuatan nilai-nilai ideal demokrasi yang mengutamakan equality, perdamaian dan penghargaan terhadap hak-hak individu maupun HAM, namun juga bermuatan inequality yang menjurus pada tindakan-tindakan pelanggaran HAM berat. Mann memandang situasi ini sebagai sisi gelap demokrasi yang menurutnya sebagai peristiwa khas masa modern.

Dalam pandangan Mann, bahwa konsep *nation state* atau negara bangsa ternyata dalam perjalanan politik modern, setelah perang dunia I dan II, telah melahirkan adanya pembantaian etnis (*ethnic cleansing*). Menurut Mann, bahwa peristiwa pembantaian etnis dalam pengalaman Eropa pada fase awal demokrasi berjalan telah ada, kemudian fenomena yang lebih spesifik bergerak ke wilayah selatan di negara-negara berkembang, seperti di Afrika, Kamboja dan beberapa negara lainnya. Kasus yang menonjol adalah etnis mayoritas membantai etnis yang minoritas (Mann 2005).

Mann mengkajinya dengan menggunakan pendekatan sosiologi historis, dengan hasil tesis bahwa pembersihan etnis yang kejam, berbentuk pembunuhan bersifat massal dan meluas sebagai fenomena modern yang dianggap sebagai sisi gelap demokrasi. Demokrasi dalam hal ini membawa berbagai kemungkinan, mayoritas menjadi tirani minoritas dalam suatu masyarakat yang multi etnik. Terutama ketika aturan rakyat (*demos*) dan etnisitas masyarakat (*ethnos*) bercampur dan membingungkan, sehingga keberadaan demokrasi pada akhirnya selalu memungkinkan mayoritas menindas minoritas.

Dengan mengemukakan bahwa fenomena pembantaian etnis menjadi sesuatu yang inheren dalam pengalaman negara bangsa di berbagai negara yang mengaku demokratis. Dalam demokrasi yang memaknai rakyat berkaitan dengan *demos* dan *ethnos*, sementara rakyat yang ada sangat beragam ataupun plural dengan berbagai stratifikasi dan adat budayanya masing-masing. Idealnya dalam demokrasi negara dapat memainkan peran dan kapasitasnya sebagai fasilitator dalam menghadapi berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakatnya, sehingga kompetisi dalam proses-proses kebijakan dapat bersifat demokratis. Namun realitanya masyarakat yang telah terbentuk lama dengan adat istiadat dan terstratifikasi

oleh struktur yang ada, umumnya bagi yang mayoritas akan mendominasi yang minoritas, karena pada dasarnya demokrasi memang berprinsip pada mayoritas ini.

Pemaparan Mann, kasus yang dapat digolongkan dalam pembersihan etnis terdapat di Eropa barat seperti Scots, Welsh dan Briton pada abad ke 19 dan awal abad ke 20, kemudian di negara-negara demokrasi seperti Inggris dan Perancis yang juga pernah mengalami pembersihan etnis secara masif, kemudian juga terjadi di Amerika Serikat terutama yang dialami oleh orang-orang Indian dan kulit hitam (negro).

Dalam hal ini etnik dan ethnos yang telah menjadi karakteristik dan telah terjadi stratifikasi dalam waktu yang lama, maka ketika sistem demokrasi datang dan menjadi acuan maka segalanya menjadi memungkinkan. Sekelompok etnik mayoritas di beberapa negara yang dipaparkan oleh Mann ini dapat berkuasa secara demokratis, namun juga secara tidak terduga dapat bertindak secara tirani dalam menghadapi etnik minoritas, karena memang secara realita kekuasaan adalah milik kaum mayoritas. Dalam banyak kasus, etnik minoritas dianggap berbeda dan tidak memiliki peradaban yang sama dengan etnik mayoritas, pada akhirnya kasus pembersihan etnis dapat terjadi dengan berbagai kasus dan alasan yang berbeda-beda, namun ada satu esensi bahwa demokrasi juga bisa dimaknai dalam pemahaman yang berbeda.

2. Sejarah Radikalisme dalam Perspektif Agama

Dalam konteks radikalisme menurut pandangan agama, perlu dimajukan tesis Wim Beuken dan Karl-Josef Kuschel yang berkesimpulan bahwa kekerasan atas nama agama bisa dilihat dari dua perspektif, yakni: pertama, pembacaan agama mengenai hubungan sosial, dimana agama merupakan legitimasi tersendiri bagi keabsahan perilaku kekerasan, karena memiliki fungsinya sebagai ideologi; kedua, agama sebagai faktor budaya identitas. Yang kedua ini bukan berarti agama sebagai produk suatu budaya, tetapi hanya sebagai salah faktor budaya identitas (penunjuk identitas yang sudah turun temurun sejak jama nabi yang membedakan dengan agama lain).

Karena faktor budaya identitas inilah, menjadikan agama sebagai salah satu sub sistem dari beberapa sub sistem yang hidup dalam masyarakat sebagai sistem besar. Lebih jelasnya bagaimana potensi radikalisme dalam agama, berikut deskripsi singkatnya.

a. Menurut Agama Islam

Semua agama mengkritik kekerasan. Islam, secara doktrinal adalah agama non-kekerasan, namun fakta penaklukan atau dalam bahasa historiografi Islam lebih dikenal dengan pembebasan (futuhat) yang dilakukan terutama mulai abad 7 juga menggandeng kekerasan.

Dikalangan Islam, radikalisme ekstrim muncul pertama kalinya pada masa pemerintahan Ustam bin Afan, dalam bentuk gerakan yang dipimpin oleh Abdulah bin Saba' bersama dua ribu pengikutnya yang menghendaki

untuk digantinya Usman bin Afan dari kedudukannya sebagai khalifah dengan Ali bin Abi Tholib. Karena mereka beranggapan bahwa Ali bin Tholib lebih dekat hubungan keluarganya dengan Rasul SAW, dibanding dengan Ustman. Kelompok Abdullah bin Saba' berhasil membunuh Khalifah Ustman bin Afan, dan Negara dalam keadaan kacau, sehingga para sahabat nabi mendesak Ali bin Abi Tholib untuk memangku jabatan khalifah untuk menghindari kehancuran Negara. Bahkan dalam sejarah gerakan radikalisme pada masa Ali semakin berkembang dengan munculnya gerakan radikal ekstrim Ibnu Saba' yang menganggap Ali dan anak cucunya sebagai titisan Tuhan. Pada masa itu pula teror dan kekacauan terjadi.

Dengan demikian jika melihat kondisi dari realitas sejarah tersebut, radikalisme muncul karena dilatar belakangi oleh berbagai motif. Misalnya oleh motif kepentingan dan konpirasi politik, atau juga karena kesenjangan ekonomi, merebaknya kemiskinan, menjamurnya ketidakadilan, dendam politik serta pemahaman yang sempit dan keliru tentang ajaran agama yang diyakininya. Sehingga pada akhirnya seluruh penganut agama dan kalangan agamawan perlu melakukan pendewasaan agama kearah yang lebih humanis dan damai (*studiperadaban.blogspot.com*).

b. Menurut Agama Keristen

Agama Kristen yang mengklaim diri dan memiliki misi sebagai agama cinta kasih, namun sejarah kekristenan juga sarat dengan kekerasan. Beberapa kasus perang agama/perang salib (*crusade*), dan kolonialisme barat atas dunia muslim abad 18 dan 19, juga sarat dengan kekerasan.

Sementara radikalisme dalam agam Kristen muncul pada abad XVI, dengan adanya reformasi yang dilakukan oleh kelompok Protestan. Reformasi tersebut memunculkan Gereja-gereja Protestan. Sehingga perpecahan tersebut merupakan awal mula atau benih munculnya radikalisme dalam agama Kristen. Tokohnya adalah seorang Marthin Luther King yang dianggap sebagai kaum radikal oleh kelompok Katholik, Marthin dianggap mampu melakukan perubahan dalam struktur gereja baik secara fisik maupun ajaran keagamaannya (*studiperadaban.blogspot.com*).

Kasus pembubaran sholat Ied dan pembakaran kios serta masjid oleh massa Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Tolikara, Papua, semakin menegaskan bahwa radikalisme ada pada hampir semua agama.

c. Menurut Agama Hindu

Dalam tradisi Hindu di India, juga terdapat ajaran agama yang memberikan legitimasi terjadinya tindakan kekerasan (Yunarto 2004:40). Dalam Hindu munculnya radikalisme tampak sebagai respon ketika Mogul Emperor menaklukkan India, di samping juga ketika penjajahan Inggris menguasai India yang diikuti oleh konversi dari Hindu ke Kristen yang dilakukan oleh para misionaris saat itu. Respon itu antara lain dalam gerakan radikal adalah munculnya *Bajrangdal*, *Rashtriya Svayam Sevak (RSS)* dan sebagainya. Di samping gerakan yang bersifat radikal, sesuai

dengan karakter pemimpinnya muncul usaha untuk mengantisipasi gerakan konversi dengan lahirnya organisasi keagamaan yang satu di antaranya populer sampai saat ini adalah *Arya Samaj* (himpunan masyarakat mulia) yang didirikan oleh Svami Dayananda Sarasvati (1875) dengan pengikutnya yang tersebar di seluruh pelosok India.

Svami Dayananda Sarasvati di kalangan umat Hindu dipahami juga sebagai seorang yang radikal, karena mentasbihkan mereka yang termarginalisasi (kaum Paria yang menurut Mahatma Gandhi disebut Harijan/pengikut atau putra-putra Tuhan) dan sudah pernah beralih agama kembali menjadi Hindu dan bagi mereka yang mau mempelajari kitab suci Veda dan melaksanakan ritual Veda (seperti *Agnihotra*) diinisiasi menjadi *Brāhmaṇa* (dengan memberi kalungan benang *Upavita*). Svami Dayananda Sarasvati melakukan terobosan dengan mengembalikan kepada ajaran suci Veda tentang penggolongan masyarakat atas tugas dan kewajibannya yang disebut *varna* (pilihan profesi) dan bukan istilah *kasta* sebagai bentuk penyimpangan *varna* tersebut. Pembagian masyarakat profesional (anatomi masyarakat) ini sifatnya abadi dan tidak berdasarkan kelahiran atau diwariskan secara turun temurun, melainkan atas dasar bakat (*guṇa*) dan pekerjaannya (*karma*). Tindakan Svami Dayananda Sarasvati ini ditentang oleh kelompok ortodok yang hanya berpegangan kepada tradisi dan bertentangan dengan kitab suci. Radikalismenya Svami Dayananda Sarasvati tidak sampai berbentuk anarkis, apalagi sampai mengarah kepada perbuatan teroris (<https://dharmavada.wordpress.com>)

Beberapa waktu yang lalu kelompok radikal Hindu menghancurkan Masjid Babri yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Dewa Rama.

d. Menurut Agama Budha

Pada kasus agama Budha, kelompok radikal itu tergambar pada kelompok bhiksu dan massa radikal yang dikoordinir oleh Bhiksu U Wirathu di Myanmar. Mereka mengusir kaum muslim Rohingnya, membunuh, dan membakar semua harta bendanya.

Gerakan ekstrim dan radikal tumbuh subur di kalangan Buddha Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, di mana menuding masyarakat Muslim mengejar dominasi di negara itu. Mereka mengklaim bahwa sikap lunak yang diperlihatkan umat Buddha telah mendorong Muslim untuk menguasai Myanmar dan wilayah Asia Selatan. Organisasi-organisasi seperti, Mabasa, Organisasi Perlindungan Ras, Assosiasi Biksu Muda Sittwe, Kelompok Nasionalis Buddhis, dan Gerakan 969 adalah komunitas Buddha ekstrim di Myanmar, yang menjalankan kebijakan Islamphobia dan menyerukan boikot bisnis Muslim.

Gerakan 969 adalah kelompok Buddha yang paling berbahaya di Myanmar dan dipimpin oleh Biksu Ashin Wirathu. Mereka dikenal sebagai mesin pembunuh nomor satu Muslim di negara itu. Gerakan 969 telah mengarah ke sebuah gerakan rasialisme dan menganggap Muslim sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kekuasaan umat Buddha di Myanmar. Muslim Rohingnya menilai Gerakan 969 sebagai organisasi

teroris dan Biskus Wirathu gencar mempromosikan kebencian terhadap Muslim di kuil-kuil (parstoday.com/id/world-adikalisme_dan_buddha_Myanmar).

7. **Prospek Gerakan Radikalisme di Indonesia**

Gerakan radikal tidak dapat hidup di zaman Orde Baru yang otoriter, tetapi kemudian menemukan ruang yang terbuka untuk hadir dan menguasai panggung politik justru setelah Indonesia mengalami demokratisasi. Kenapa demikian? Demokrasi mensyaratkan adanya toleransi. Penguasa di era demokrasi terpenjara oleh kebutuhan untuk menjaga citra sebagai pemimpin atau penguasa yang demokrat dengan bersikap toleran terhadap penggunaan kebebasan oleh individu atau kelompok, termasuk toleran terhadap perilaku kelompok yang tidak jarang menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan ide-ide dan keyakinannya. Kaum moderat juga cenderung toleran dengan bersikap diam, meskipun sebenarnya mereka tidak setuju pada aksi kaum kelompok militan ini. Sudah barang tentu ada juga kaum moderat yang diam-diam menyetujui perilaku kelompok militan radikal, karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh kelompok ini sejalan dengan kepentingan atau nilai mereka.

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana prospek gerakan radikalisme di Indonesia yang disebut sebagai salah satu negara terbesar demokrasi di dunia, ada dua pendekatan yang bisa dipakai. Gerakan radikalisme yang dimaksud disini adalah gerakan radikal untuk memaksakan kehendak melawan dan mengganti pemerintahan yang sah secara konstitusional. Lebih jelasnya berikut kedua pendekatan yang dimaksud.

a. **Pendekatan Kerusakan Sistem**

Jika menggunakan teori kerusakan sistem seperti yang dikemukakan David Apter di atas, yang menamakan kerusakan sistem pemicu utama lahirnya gerakan radikalisme, maka jawabannya : Radikalisme di Indonesia dapat berkembang seiring perkembangan waktu! Alasan pembenarnya adalah telah terjadi kerusakan sistem di hampir seluruh elemen berbangsa dan bernegara. Data dan fakta tak terbantahkan, sistem hukum di Indonesia tidak mampu lagi mendistribusikan keadilan yang merata kepada seluruh warga bangsa. Dalam implementasinya di lapangan, hukum semakin tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya hukum tanpa disadari telah berproses menjadi ibu kandung yang akan melahirkan radikalisme.

Sementara di bidang ekonomi tidak mau ketinggalan mengikuti jejak penegakan hukum yang diskriminatif. Sudah terlalu terang menderang sistem ekonomi kerakyatan yang digariskan dalam UUD 45 dibantai dengan mengadopsi sistem ekonomi kapitalis liberal dari Barat. Kerusakan sistem ekonomi dapat dilihat dilihat ketika penerapan konsep *Laissez-faire* (mekanisme penentuan tingkat harga barang di pasar diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa adanya intervensi pemerintah). Apa mungkin pasar bisa menyelesaikan persoalan rakyat

kecil (rentang terpengaruh gerakan radikal) ketika kelaparan akibat ketidakmampuan membeli beras dan lauknya yang harganya tidak terjangkau.

Menurut data ada beberapa hal yang bisa menyebabkan lahirnya gerakan radikalisme, salah satunya adalah kemiskinan struktural yang entah sadar atau tidak sadar pemerintah membiarkannya. Maksudnya kemiskinan struktural adalah orang miskin bukan karena tidak atau malas bekerja, tetapi karena sistem yang hanya mengakomodasi kepada orang-orang yang memiliki modal. Kalau pemerintah tidak mampu mengolakan hasil dari sumber-sumber kekayaan alam secara merata kepada rakyat yang dijamin oleh pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka sadar atau tidak sadar pemerintah telah menabur benih-benih radikalisme di dalam jantung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekali lagi, bukan agama menjadi pemicu utama lahirnya radikalisme, tetapi kerusakan sistem ekonomi yang membiarkan rakyat kelaparan di tengah kumpulan orang yang berlebihan karena dimanjakan sistem kapitalisme yang diterapkan pemerintah. Ekonomi Indonesia saat ini menggumpal di tangan taipan dan besarnya jumlah penduduk dan tingginya daya beli membuat para pebisnis semakin bergelimang untung. Data menunjukkan, tanah Jakarta sekarang sudah hampir 80% dikuasai non-pribumi, begitu pula tanah di Jawa. Kekayaan alam dan minyak dikuasai asing. Hutan kita juga dikuasai mereka, yang semuanya bertentangan dengan pasal 33 UUD 45. Pertamina sudah bukan BUMN lagi, tinggal namanya doang. Listrik kita sudah beli dari asing, diijual dan digadaikan (Suara-islam.com, *Kaum Cina Menggusur Islam dan Pribumi*).

Kalau kerusakan sistem hukum dan ekonomi seperti yang dijelaskan di atas dihubungkan dengan potensi munculnya gerakan radikalisme, maka selain teori Kerusakan Sistem, teori Kekerasan Struktural juga menarik untuk dijadikan pisau analisis. Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparaturnegara. Jadi dua teori ini cukup menjamin, gerakan radikalisme berpotensi semakin berkembang di Indonesia.

b. Pendekatan Radikalisme Berlatar Agama

Kalau menggunakan pendekatan ini untuk memotret prospek gerakan radikalisme di Indonesia, maka jawabannya : tidak sebesar peluangnya dibandingkan dengan pendekatan pertama yang melihat kerusakan sistem sebagai pemicu utama radikalisme di Indonesia. Dikatakan tidak sebesar peluang, karena berdasarkan sejarah pergerakan di Indonesia, hampir belum pernah gerakan radikalisme muncul melawan pemerintahan yang sah secara konstitusional karena alasan agama. Hampir

semua pergerakan yang muncul di Indonesia dilatarbelakangi akibat dendam karena pengkhianatan, bukan karena agama.

Namun untuk menjawab bagaimana prospek gerakan radikalisme di Indonesia dengan pendekatan agama, khususnya agama Islam. (Islam dijadikan contoh, karena agama mayoritas dan paling berpeluang melakukan gerakan radikalisme menentang pemerintah), perlu dikedepankan pendapat Al-Asymawy, seorang intelektual Mesir, bahwa ketika Islam begitu dekat dengan politik dan kekaisaran maka arah Islam sendiri diganti secara radikal oleh manipulasi politik. Inilah kemudian yang menjadi keprihatinan dalam satu dasawarsa perjalanan demokrasi Indonesia (Taufiq 2004:7)

Berbicara tentang Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia, penelusurannya tidak dapat lepas dari kemampuan Islam dalam mengkonsolidasi berbagai kekuatan politik hingga menjadi kekuatan nasional dalam berbagai isu. Sementara munculnya dikotomi antara kelompok Islam dan Nasionalis dalam perpolitikan nasional secara tidak sengaja, telah menempatkan Islam sebagai kekuatan politik tersendiri yang cukup signifikan di luar kekuatan politik lainnya. Pendek kata, mulai masa sebelum kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, era transisi hingga masa reformasi, Islam tetap dianggap sebagai kekuatan politik yang cukup dominan dan memberikan aroma tersendiri dalam upaya pembaharuan.

Menanggapi maraknya partai-partai Islam pasca orde baru telah menimbulkan perdebatan yang kontroversi karena representasi dari gerakan politik islam tercermin dari politik partai itu sendiri. Bagaimana partai memahami islam dan mengimplementasikan politiknya sesuai dengan nilai – nilai islam atau sebaliknya partai islam hanya memanfaatkan simbol untuk menarik dukungan suara dari masyarakat islam. Fenomena itu dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam, atau yang diistilahkan sebagai “repolitisasi Islam”. Repolitisasi bisa bermakna ganda, penilaian pertama bernada positif karena seperti agama-agama lain, Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Penilaian kedua, jika istilah itu dipahami secara benar, adalah negatif. Istilah “politisasi” (terhadap apa saja) selalu dipersepsikan sebagai bagian dari rekayasa yang bersifat *pejorative* atau *manipulatif*. Bisa dibayangkan apa jadinya jika hal tersebut dikenakan pada sesuatu yang mempunyai sifat ilahiyah seperti agama Islam.

Untuk konteks Indonesia, sampai ditulisnya makalah ini, ada keyakinan repolitisasi Islam (kembali politik Islam) adalah untuk membuktikan bahwa Islam sebagai salah satu kekuatan politik besar di republik ini yang akan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Karena itu, partai-partai Islam yang banyak bermunculan pasca reformasi dalam meraih simpatik rakyat sangat hati-hati menghembuskan isu SARA. Partai-partai Islam tetap berada dalam koridor kebhinnekaan, sehingga potensi munculnya pendukung partai militan masih bisa ditolerir. Disamaping itu, partai politik Islam, belum benar-benar menerapkan sistem politik Islam dalam menjalankan partainya. Partai Islam belum

mengimplementasikan politiknya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga sikap militansi untuk mempertahankan ide dan keyakinan Islam tidak mendominasi pergerakan politiknya. Yang terjadi, justru partai politik Islam (PPP, PAN, PKB, PKS) hanya memanfaatkan simbol Islam untuk menarik dukungan suara dari masyarakat Islam, belum menggunakan sistem doktrinisasi halal haram dalam berpolitik.

Jadi kekhawatiran Al-Asymawy seorang intelektual Mesir, bahwa ketika Islam begitu dekat dengan politik dan kekaisaran maka arah Islam sendiri diganti secara radikal oleh manipulasi politik, sampai ditulisnya makalah ini belum terjadi di Indonesia. Tokoh-tokoh Islam yang bergabung atau membentuk partai politik masih tetap konsisten meyakini bahwa Islam adalah agama cinta damai dan anti kekerasan. Wajah damai inilah kemudian yang membedakan partai politik Islam di Indonesia dengan partai politik Islam di negara-negara Islam lainnya. Itu berarti potensi berkembangnya gerakan radikalisme di Indonesia sebagai akibat repolitisasi Islam tidak terlalu mengkhawatirkan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila.

8. Simpulan

Prospek gerakan radikalisme di Indonesia jika dilihat dari “Teori Kerusakan Sistem” dan “Teori Kekerasan Struktural”, sangat memiliki potensi untuk berkembang seiring perkembangan bangsa ke depan. Hal ini dimungkinkan, karena data dan fakta tidak terbantahkan sekarang telah terjadi kerusakan sistem di dua pondasi utama bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kerusakan pertama yang dimaksud adalah kerusakan sistem hukum yang tidak jenuh-jenuhnya pemerintah melanggengkan tatakelola “hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Sistem hukum selama ini telah gagal mendistribusikan keadilan yang merata kepada seluruh warga bangsa. Banyak proses hukum mempertontonkan terjadinya diskriminasi hukum. Kerusakan kedua adalah kerusakan sistem ekonomi yang sengaja menyinggung ekonomi kerakyatan berpaling ke sistem ekonomi kapitalis. Sistem kapitalisme ini gagal mengalokasikan sumber-sumber kekayaan alam melimpah yang dimiliki bangsa secara merata kepada seluruh warga bangsa. Kalau sistem ekonomi kapitalis ini tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi pemantik utama bara api radikalisme.

Sementara kalau radikalisme ditinjau dari pendekatan agama, peluangnya berkembang di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan pendekatan kerusakan sistem. Hal ini disebabkan, karena rakyat Indonesia tidak memiliki bakat melakukan gerakan radikalisme melawan pemerintahan yang sah secara konstitusional atas nama agama lagi, pasca pemberontakan DI/TII tahun 1962. Setelah itu warga negeri ini sudah akrab dengan keragaman agama, suku, dan bahasa. Namun bukan berarti tidak memiliki potensi radikalisme meledak di Indonesia yang dilatarbelakangi agama. Terlebih era demokratisasi memberi peluang kebebasan kepada seluruh warga bangsa dan kelompok untuk memperjuangkan ide-ide dan keyakinannya. Namun jika melihat ke belakang satu dasawarsa perjalanan bangsa ini, maka bisa disebutkan bahwa potensi

munculnya gerakan radikalisme atas nama agama untuk melawan pemerintah yang sah peluangnya sangat kecil.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Beuken, Wim dan Kuschel, Karl-Josef et.al. *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?* Terj. Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, xiv-xxv
- Critical Review : Masalah-Masalah Demokrasi : Michael Mann, *The Dark Side of Democracy, Explaining Ethnic Cleansing*, New York : Cambridge University, 2005
- Geroge Sorensen, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Jakarta : Pustaka Pelajar
- Lambang Triyono, *Baca Wacana Kekerasan Dalam Masyarakat Transisi*, Yogyakarta : Insist, Edisi 9 tahun III. 2002
- Sooerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Thomas Santoso, 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Wardi Taufiq, 2004, *Pemikiran Politik Islam Merebut Ruang Publik*, dalam Gerakan Radikal Islam di Indonesia, Jakarta : AYS-NET
- Yunanto, 2004, *Respon Islam Politik Terhadap Persoalan Radikalisme di Indonesia*, dalam Gerakan Radikal Islam di Indonesia, Jakarta : AYS-NET

B. Internet

- suara-islam.com, *Kaum Cina Menggusur Islam dan Pribumi*, 13-12-2014
- matatasbih.net, *Indonesia Telah Dipilih Allah Menjaga Kaeslian Islam*, 2-12-2016
- studiperadaban.blogspot.com*
- <https://dharmavada.wordpress.com/2009/10/16/agama-radikalisme-dan-terorisme>
- parstoday.com/id/world-radikalisme_dan_rasialisme_buddha_di_Myanmar*